

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini isu lingkungan menjadi agenda global dan isu ini termasuk kedalam isu kontemporer saat ini. Isu yang menjadi fokus dan sorotan utama dalam berbagai forum dan komunitas global untuk menjadi bahan diskusi menjadi penting dengan perkembangannya yang semakin meningkat. Kemunculan isu ini terjadi sekitar tahun 1960-an akhir hingga 1970-an awal dan terlihat menjadi penanda awal dari adanya kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan yang kian hari dan tahun semakin mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga sejak tahun 2000-an, banyak negara yang telah mengalami kesadaran lingkungan dan seberapa pentingnya lingkungan menjadikan kesadaran lingkungan menjadi semakin berkembang (Franzen & Bahr, 2024). Perhatian yang dimiliki dan diberikan oleh internasional maupun global terhadap isu lingkungan salah satunya ada perubahan iklim yang memberikan dampak pada kerusakan lingkungan, disisi lain pencemaran yang semakin meningkat dan memperparah kerusakan lingkungan yang mana sumber pencemaran tidak hanya dari domestik akan tetapi merubah sifatnya menjadi lintas batas. Hal ini menjadikan isu lingkungan termasuk dalam permasalahan yang kompleks dan rumit yang telah terjadi di beberapa dekade terakhir ini.

Aktivitas manusia yang menjadi pendorong dalam memperkuat terjadinya perubahan iklim maupun kerusakan lingkungan. Aktivitas manusia seperti aktivitas industri, ekonomi, serta mobilitas yang terjadi semakin mengalami peningkatan dengan berkembangnya era saat ini. Dampak dari adanya aktivitas ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, polusi, adanya eksploitasi, dan mempercepat dan memperparah terhadap kerusakan lingkungan (IPCC, 2023). Dampak ini dirasakan tidak hanya oleh masyarakat domestik saja tetapi dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas lagi atau secara global. Dan juga memberikan mempengaruhi pada iklim global, rantai makanan, maupun kehidupan sosial

ekonomi masyarakat yang tentunya bersifat luas. Adanya kesadaran lingkungan memberikan kontribusi penting untuk dapat memahami apa yang terjadi pada lingkungan dan dapat terjadinya pengurangan dampak yang negatif terhadap lingkungan.

Perubahan iklim yang didorong oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, kini berkembang menjadi krisis iklim global. *Intergovernmental Panel on Climate Change* pun menjelaskan mengenai adanya peningkatan dalam suhu global yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil maupun adanya pengalihan fungsi lahan yang menghasilkan emisi buangan berupa gas rumah kaca sejak masa sebelum industrialisasi (IPCC, 2023). Perubahan iklim merujuk pada adanya perubahan dalam jangka waktu yang lama atau panjang terhadap pola cuaca secara rata-rata yang mana hal tersebut dapat menentukan keadaan iklim baik secara lokal, regional, maupun global sehingga memberikan efek dan dampak (NASA, 2024). Perubahan iklim juga mengacu pada kondisi suhu serta pola cuaca yang mengalami perubahan dalam jangka waktu panjang yang terjadi dengan natural atas adanya siklus matahari, namun adanya aktivitas manusia sejak abad ke-19 atau dekade 1800-an yang merubah hal tersebut sehingga mengalami percepatan dan menjadi faktor utama penyebab perubahan iklim (PBB Indonesia, 2022). Perubahan iklim yang telah menjadi sebuah agenda internasional dan global dalam diskusi mengenai lingkungan dan tidak dapat dilihat hanya masalah domestik saja. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia akibat globalisasi dan ekspansi ekonomi, tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat.

Aktivitas manusia telah menyebabkan berbagai tekanan terhadap lingkungan Arktik, termasuk polusi kimia, perubahan iklim, serta berbagai kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut (L.-O. Reiersen et al., 2020). Menjadikan adanya sistem dalam produksi dan konsumsi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cepat seperti industri, pertanian, dan peningkatan mobilitas menjadi sering mengabaikan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem alami. Pertanda adanya perubahan iklim terlihat dari adanya peningkatan suhu global, dimana hal itu juga terlihat dari adanya fenomena pencairan es, naiknya tinggi permukaan air laut, dan cuaca yang

semakin ekstrem yang terjadi dan salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari industri, transportasi, maupun dari bidang energi (Masson-Delmotte et al., 2021). Adanya peningkatan suhu menyebabkan perubahan pola iklim oleh pemanasan global mendorong terjadinya perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan cuaca yang ekstrim (DLH, 2019).

Peningkatan suhu yang mengarah pada adanya pemanasan global telah terjadi pada beberapa dekade terakhir. Fenomena ini terjadi dimana suhu rata-rata mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh adanya gas rumah kaca yang terus menumpuk di udara atau atmosfer. Sehingga suhu mengalami peningkatan yang signifikan yang mana gas ini memerangkap panas matahari yang telah dipantulkan dan tidak bisa keluar dari atmosfer (Admin BMKG, 2025b). Hasil dari adanya aktivitas pembakaran seperti pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas penebangan liar pohon sehingga mengalami deforestasi, serta pencemaran udara dari limbah yang dihasilkan dari industri tidak sesuai dengan aturan. Pemanasan global ini semakin meningkat karena adanya gas rumah kaca yang merupakan pelepasan karbon dioksida ke udara (CO_2) serta metana (CH_4) (Bagaskara, 2022). Pemanasan global yang memberikan dampak akibat aktivitas tersebut mempengaruhi pada suhu yang meningkat, ketinggian permukaan air laut, habitat, dan ekosistem yang terganggu dan terus menyusut, mengancam keanekaragaman hayati dan sumber mata pencaharian (National Geographic, 2025). NOAA (2023) pun menunjukkan pada tahun 2023 kadar atau kandungan karbon dioksida di udara atau atmosfer mencapai 419,2 ppm dan menjadi kadar tersebut lebih tinggi 51% dari masa sebelum industrialisasi (NOAA, 2023). Pada tahun 2024 kadar karbon dioksida mencapai 422,8 ppm mengalami peningkatan 3,75 ppm dari tahun sebelumnya (NOAA, 2025). Adanya peningkatan gas rumah kaca ini menyebabkan berbagai fenomena iklim yang ekstrem seperti gelombang panas sehingga naiknya suhu bumi, kekeringan, banjir besar, dan pola curah hujan maupun iklim menjadi tidak stabil. Peningkatan kadar yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan kadar karbon di udara semakin tinggi dan menyebabkan suhu meningkat.

(NASA, 2025) melaporkan pada tahun 2024 merupakan tahun terpanas

sejak dimulai dalam pencatatan suhu global oleh NASA sejak 1880-an hingga saat ini. Pada tahun 2021 suhu mencapai $0,85^{\circ}\text{C}$ dan menjadi yang terpanas dirutan keenam, selanjutnya pada tahun 2022 suhu naik mencapai $0,89^{\circ}\text{C}$ sebagai tahun terpanas diurutkan kelima dengan pemanasan stabil. Tahun 2023 suhu meningkat lumayan tajam mencapai $1,18^{\circ}\text{C}$ menjadikan pada tahun tersebut memecahkan terpanas sementara, hingga pada tahun 2024 mengalami puncak dengan suhu $1,29^{\circ}\text{C}$ menjadikan tahun terpanas sejak 1880-an, dan tahun 2025 tercatat suhu menjadi $1,19^{\circ}\text{C}$ menjadi tahun ketiga terpanas (NASA, 2025). Peningkatan ini menunjukkan kecenderungan pemanasan yang kian meningkat dan ekstrem yang dikeluarkan oleh NASA. Salah satu dampak paling signifikan dari pemanasan global yang mendorong perubahan iklim adalah mencairnya lapisan es di wilayah kutub, terutama di Arktik. Mencairnya es di Arktik akibat pemanasan global adalah salah satu dampak perubahan iklim paling serius, memicu kenaikan permukaan laut secara global, hilangnya habitat satwa, dan gangguan siklus iklim. Fenomena ini menjadi pertanda bahwa pada abad ke-21, hubungan manusia dengan alam mengalami ketidakseimbangan yang serius. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal atau nasional, tetapi juga lintas batas dan global.

Salah satu kawasan yakni wilayah Arktik mengalami pemanasan dua hingga empat kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *Arctic amplification* (PAME, 2020). Pemanasan serta adanya peningkatan suhu global secara langsung memicu pencairan es kutub dan *permafrost* mengurangi ketebalan es, serta menyebabkan perubahan drastis pada ekosistem darat dan perairan (Admin BMKG, 2025a). Hal ini mengakibatkan kenaikan muka air laut, gangguan habitat satwa, hingga risiko banjir pesisir dan kerusakan terumbu karang. Menjadikan Arktik sebagai kawasan yang sangat rentan dan menjadi salah satu indikator pertama untuk melihat perubahan iklim global. *National Snow and Ice Data Center* (NSIDC) melaporkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun dengan tingkatan maksimum terendah pada bulan maret (puncak musim dingin) 2025 untuk luas es laut Arktik dalam 47 tahun terakhir menurut satelit (NSIDC, 2025). Pada tahun 2021, luas es laut artik berada pada 14,78 juta km^2 , selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 14,62 juta km^2 , tahun 2025 menjadi yang terendah dengan 14,33 juta km^2 . Penurun

maksimum ini pertanda bahwa wilayah es laut arktik semakin menipis setiap tahun bahkan saat puncak musim dingin berlangsung. Pencairan es ini tidak hanya mengubah karakteristik geografis dan lingkungan kawasan, tetapi juga membuka akses baru terhadap sumber daya alam dan jalur pelayaran yang sebelumnya tertutup es, dan kemudian memicu peningkatan akan aktivitas ekonomi, termasuk eksplorasi minyak dan gas, perikanan, dan transportasi laut (Smieszek, 2019). Kondisi ini memberikan pengaruh pada Arktik yang tidak hanya menjadi titik kritis dalam konteks lingkungan global tetapi kawasan. Ketertarikan berbagai aktor terhadap potensi sumber daya alam, jalur pelayaran baru, serta aktivitas eksplorasi dan industri yang meningkat turut menambah tekanan terhadap keseimbangan ekologis di wilayah ini (Kirchner & Koivurova, 2022).

Dampak dari pemanasan global bagi Arktik menghadapi berbagai bentuk pencemaran lintas batas yang memperparah degradasi lingkungan di kawasan ini. Polutan seperti logam berat, *persistent organic pollutants* (POPs), *black carbon*, dan mikroplastik telah terdeteksi secara luas melalui pemantauan lingkungan lintas dekade (J. F. Provencher et al., 2023). Polutan ini mengalami perpindahan melalui laut, udara, maupun rantai makanan global hingga terkumpul di ekosistem Arktik maupun di tubuh makhluk hidup (AMAP, 2025c). Kontaminan ini sebagian besar tidak berasal dari Arktik sendiri, tetapi ditransportasikan dari wilayah lain melalui atmosfer, arus laut, atau aktivitas industri internasional. Laporan AMAP menunjukkan bahwa berbagai kontaminan telah terdeteksi dalam tubuh hewan laut seperti anjing laut, paus, dan ikan, serta dalam darah masyarakat adat yang mengandalkan sumber daya hayati tersebut sebagai bagian dari mata pencaharian dan budaya di kawasan ini (AMAP, 2021b). Polutan seperti *black carbon* yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, tidak hanya mencemari atmosfer tetapi juga mempercepat pencairan es dengan mengurangi reflektifitas permukaan salju dan es (*albedo*). Saat karbon hitam ini mengendap di salju atau es, ia mempercepat pencairan sehingga mengurangi ruang putih di Kutub Utara. Dan ketika *black carbon* juga mengendap di permukaan es dan salju, ia menyerap lebih banyak energi matahari, mempercepat proses pencairan, dan menciptakan umpan balik positif dalam sistem iklim (Kühn et al., 2020). Selanjutnya, mikroplastik kini juga telah menjadi isu serius di Arktik. pecaha

plastik dalam ukuran mikroskopis ditemukan di laut, salju, udara, bahkan dalam tubuh spesies laut dan burung-burung Arktik. Mikroplastik di kawasan ini tidak hanya berasal dari aktivitas lokal seperti pelayaran atau industri perikanan, tetapi juga terbawa dari lintas benua melalui persebaran dan dibawa oleh air maupun udara (J. F. Provencher et al., 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa degradasi lingkungan di Arktik bukan hanya hasil dari aktivitas domestik, tetapi juga bagian dari global yang lebih luas. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius dalam aspek tata kelola lingkungan.

Situasi ini menuntut adanya respons bersama dari aktor-aktor regional yang memiliki kepentingan geografis, ekologis, dan politik terhadap kelestarian wilayah ini. Perubahan lingkungan yang terjadi tidak bisa ditangani secara unilateral oleh satu negara saja, karena dampaknya menyebar melintasi batas wilayah dan telah dirasakan juga oleh masyarakat adat mengenai ketahanan ekosistem (Townhill et al., 2022). Demikian diperlukan suatu sistem kelembagaan untuk sebagai menjembatani berbagai kepentingan, kolaborasi, serta untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan lingkungan yang menyeluruh dengan didasari oleh basis data ilmiah. Data lingkungan yang kredibel menjadi dibutuhkan dan diperlukan untuk melakukan pemantauan serta penilaian dalam suatu mekanisme kelembagaan untuk penyusunan sebuah rekomendasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Arktik. Untuk mencapai masa depan Arktik yang berkelanjutan, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan perlu dibekali dengan pengetahuan serta data mengenai perubahan lingkungan yang sedang berlangsung di kawasan Arktik (Zhu et al., 2022). Sehingga kelembagaan diperlukan dalam memenuhi data lingkungan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada para pembuat kebijakan. Mekanisme koordinasi bagi negara-negara yang termasuk kedalam kawasan Arktik sekaligus untuk menjawab dari tantangan lingkungan yang ada.

Sebagai sebuah respon dari adanya tantangan dan kepentingan tersebut, terbentuklah suatu *intergovernmental forum* yang menjadi wadah untuk bekerjasama secara regional yakni *Arctic Council*. Sebagai aktor utama dalam tata kelola kawasan yang didirikan pada tahun 1996 melalui Deklarasi Ottawa, *Arctic Council* memiliki fungsi sebagai forum kerja sama antarnegara Arktik yang

berfokus mengenai isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sebuah forum regional yang menghimpun negara-negara Arktik dan perwakilan masyarakat adat untuk membahas isu-isu strategis, terutama dalam bidang lingkungan. *Arctic Council* dibentuk untuk memberikan konsultasi dan memberikan ruang dalam bekoordinasi antar negara-negara Arktik terkait isu perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Forum ini terdiri dari delapan negara anggota (Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat), serta enam organisasi masyarakat adat yang memiliki status sebagai *Permanent Participants*. Hal ini, menunjukkan keterlibatan terhadap suara komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan. *Arctic Council* memiliki pendekatan yang bersifat *non-binding* dan berbasis konsensus, namun tetap memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi dialog, membentuk norma tata kelola regional, dan mendorong kerja sama ilmiah lintas batas. Meski tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan membuat hukum yang mengikat secara internasional, *Arctic Council* telah menjadi media penting dalam merespons tantangan lingkungan dan mengembangkan instrumen kebijakan melalui laporan ilmiah, rekomendasi kebijakan, serta koordinasi antarnegara dan aktor non-negara (Stokke, 2024). Disisi lain, *Arctic Council* menjadi wadah utama dalam pengumpulan data, pemantauan kondisi lingkungan, dan penilaian risiko ekologis melalui *working groups* yang dimilikinya, seperti *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP), *Arctic Contaminants Action Program* (ACAP), *Conservation of Arctic Flora and Fauna* (CAFF), *Emergency Prevention, Preparedness and Response* (EPPR), *Protection of the Arctic Marine Environment* (PAME), dan *Sustainable Development Working Group* (SDWG). Hal ini menunjukkan bahwa *Arctic Council* bukan hanya forum diplomatik, tetapi juga merupakan aktor epistemik yang menjembatani sains dan kebijakan (Smieszek, 2019).

Sebagai bagian dari struktur kerja *Arctic Council*, kelompok kerja (*working groups*) memiliki mandat khusus dalam menangani isu-isu tertentu yang termasuk kedalam ranah kerja masing-masing, seperti menangani berbagai isu kunci di kawasan Arktik. Mulai dari konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan laut, hingga pemantauan dan penilaian lingkungan. Kelompok-

kelompok kerja ini merupakan sarana yang utama, dimana memungkinkan *Arctic Council* menjalankan fungsinya sebagai forum koordinasi berbasis sains. Di antara enam *working groups*, salah satu yang memiliki peran sentral dan konsisten dalam isu-isu lingkungan adalah *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP). AMAP yang memiliki bertujuan untuk memantau dan menilai sebuah tingkatan, tren, serta adanya dampak polutan serta adanya perubahan iklim terhadap situasi dan kondisi di lingkungan Arktik dan juga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut melalui pengumpulan dan analisis data ilmiah serta penyusunan laporan penilaian yang menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan (L.-O. Reiersen et al., 2020). Melalui pendekatan berbasis sains atau pengetahuan, AMAP menjadi salah satu pilar penting dalam memahami dan merespons dinamika kerusakan lingkungan di kawasan Arktik.

Arctic Council didirikan pada tahun 1996 dan AMAP menjadi salah satu kelompok kerjanya memiliki mandat utama dalam melakukan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data ilmiah terkait kondisi lingkungan Arktik. Fokus kerja yang dimiliki AMAP diantaranya dalam melakukan pemantauan atau *monitoring* dan juga melakukan penilaian dengan adanya tingkatan serta dampak dari polutan lingkungan serta perubahan iklim di Arktik yang berdampak juga pada ekosistem dan kesehatan masyarakat terkhusus masyarakat adat (L. O. Reiersen et al., 2024). AMAP secara aktif mengeluarkan laporan-laporan penilaian (*assessment reports*) yang menyeluruh dan berbasis bukti ilmiah (*science-based*). Laporan ini dipakai menjadi dasar pembuatan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan-laporan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Didalamnya terdapat dan mencakup analisis risiko dari berbagai jenis polusi seperti *persistent organic pollutants* (POPs), logam berat, *black carbon*, dan mikroplastik, dan sebagainya serta dampaknya terhadap kesehatan manusia dan ekosistem (J. F. Provencher et al., 2023). AMAP memainkan peranan juga dalam membentuk pemahaman bersama mengenai tantangan lingkungan Arktik serta untuk menginformasikan keputusan politik yang lebih responsif dan berkelanjutan (Rottem, 2021).

Meskipun *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) telah aktif sejak awal berdirinya *Arctic Council*, kontribusi pastinya dalam merespons

kerusakan lingkungan Arktik masih belum banyak dilakukan secara mendalam, khususnya dalam konteks bagaimana fungsi-fungsi seperti pemantauan (*monitoring*), penilaian (*assessment*), dan evaluasi lingkungan dilaksanakan dalam kerangka kerja *Arctic Council*. Sebagian besar studi masih berfokus pada perubahan iklim secara luas atau pada dinamika geopolitik kawasan, sementara fungsi teknis kelembagaan dan bagaimana strukturnya seperti *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) cenderung luput dari perhatian (AMAP, 2025a). AMAP tidak hanya terbatas pada menghasilkan data, tetapi dalam pelaksanaannya yang mengikutsertakan masyarakat adat didalamnya dengan kebutuhan akan *indigenous knowledge*. *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) berupaya mengintegrasikan *indigenous knowledge* atau pengetahuan adat dalam pemantauan perubahan lingkungan. Sehingga keberadaannya sendiri semakin penting dalam kerangka keterbukaan dan keadilan. Namun, di tengah kontribusinya yang besar, *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) menghadapi kendala signifikan akibat ketegangan atau ketidakstabilan kawasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir kebelakang. Sehingga terganggu pertukaran data dan menimbulkan kesenjangan atau kekosongan data (*data gaps*) dalam pemantauan lingkungan Arktik, dimana wilayah pemantauan terutama di Arktik Rusia, tidak lagi memberikan data rutin karena terhentinya kerja sama internasional, kondisi ini menciptakan *data gaps* yang menghambat kemampuan AMAP untuk melakukan analisis komprehensif terkait polusi, kondisi es laut, atmosfer, dan perubahan ekosistem (Timoshenko, 2024).

Meskipun telah banyak kajian yang membahas perubahan iklim dan dinamika Arktik, penelitian ini mengkaji bagaimana respons kelembagaan regional berbasis sains dijalankan melalui mekanisme pemantauan dan penilaian masih relatif terbatas. Terutama upaya *Arctic Council* melalui *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) sebagai alat utama dalam menghubungkan data ilmiah dengan proses pembuatan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan lingkungan regional masih sedikit. Celah inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini, yaitu untuk memahami bagaimana *Arctic Council* melalui AMAP, menjalankan perannya dalam merespons kerusakan lingkungan Arktik dalam konteks tata kelola

lingkungan regional. Dengan meneliti bagaimana AMAP menjalankan perannya dalam menangani kerusakan lingkungan dengan berbasis sains, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap pemahaman mengenai tata kelola lingkungan regional di kawasan Arktik. Studi ini tidak hanya akan memperkaya literatur tentang organisasi regional dan kerja teknis lingkungan, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana struktur kelembagaan regionalan *non-biding* dapat memainkan peran dalam menghadapi krisis lingkungan yang bersifat kompleks dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menganggay judul **“KONTRIBUSI ARCTIC COUNCIL MELALUI ARCTIC MONITORING AND ASSESSMENT PROGRAMME (AMAP) DALAM MENANGANI KERUSAKAN LINGKUNGAN DI ARKTIK”**.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana kontribusi *Arctic Council* melalui *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) dalam menghadapi kerusakan lingkungan di kawasan Arktik. Penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya *Arctic Council* dalam merespon kerusakan Lingkungan di Arktik?
2. Bagaimana kontribusi *Arctic Council* melalui *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) dalam menangani kerusakan lingkungan?

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penulis membatasi pada analisis terhadap kontribusi *Arctic Council* melalui *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) dalam menangani kerusakan lingkungan di kawasan Arktik. Fokus utama diletakkan pada bagaimana

AMAP menjalankan fungsinya dalam pemantauan (*monitoring*), penilaian (*assessment*) dan evaluasi, rekomendasi, dan penyampaian informasi ilmiah mengenai kondisi lingkungan Arktik. Penelitian ini tidak membahas seluruh aktivitas atau kebijakan *Arctic Council* secara keseluruhan, melainkan hanya berfokus pada *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) sebagai salah satu *working group* yang relevan dengan topik yang diangkat. Penelitian ini dibatasi pada periode 2023 hingga 2025, yaitu masa kepemimpinan (*chairship*) Norwegia dalam *Arctic Council*. Pemilihan periode ini mempertimbangkan pentingnya melihat kontribusi terbaru dan respons *Arctic Council* dan serta AMAP terhadap dinamika lingkungan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir dari AMAP Workplan 2021-2023 dilanjutkan menjadi AMAP Workplan 2021- 2023 (*continued in 2023-2025*) . Adanya pembatasan ini untuk membantu penulis agar tidak keluar dari rencana penelitian dan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan respon *Arctic Council* dalam menangani isu lingkungan di Arktik.
2. Untuk menjelaskan kondisi wilayah Arktik akibat kerusakan lingkungan.
3. Untuk menjelaskan kontribusi dan upaya *Arctic Council* melalui *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) dalam menangani kerusakan lingkungan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Untuk mengembangkan kajian hubungan internasional dalam bidang *environmental governance*, organisasi regional, dan *green politics*.

Dengan menganalisa upaya dan kontribusi *Arctic Council* melalui *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) terhadap kerusakan lingkungan sebagai isu di Arktik.

2. Kegunaan Praktis

Untuk digunakan sebagai bahan bacaan serta informasi kepada pembaca terkait tata kelola untuk menghadapi maupun menangani permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan Arktik. Penulis memiliki harapan terhadap penelitian ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami kawasan tersebut.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan tantangan dari upaya *Arctic Council* dalam perlindungan lingkungan. Dan digunakan sebagai syarat bagi penulis untuk melakukan sidang dan lulus dari Universitas dengan program studi hubungan internasional.

1.5. Kerangka Teoritis/Konseptual

1.5.1. Environmental Governance

Environmental governance merupakan serangkaian sistem yang mengatur cara berinteraksi antara manusia dan lingkungan melalui suatu institusi maupun sistem kelembagaan. Aturan, praktik, kebijakan, maupun institusi yang melakukan dan mengatur interaksi manusia dengan lingkungan agar berbasis lingkungan dan dapat berjalan beriringan. Dengan tujuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mencegah degradasi, dan melibatkan pemerintah, swasta, serta masyarakat sipil secara seimbang. Konsep ini menjadi ada dan kian terus berkembang dan menjadi respon atas adanya hambatan dalam pengelolaan lingkungan yang sebelumnya hanya terfokus pada negara atau state centre berubah dan berkembang menjadi adanya keterlibatan aktor negara maupun non-negara dalam terjun langsung untuk melakukan pengelolaan sumber daya supaya berkelanjutan. Keterlibatan adanya aktor memberikan pengaruh bagaimana

tindakan dan hasil serta implementasi yang dilakukan mengenai lingkungan.

Dalam hal ini, *environmental governance* memberikan penekanan bahwa dalam adanya pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan dan ditetapkan oleh negara saja, akan tetapi juga oleh adanya kegiatan interaksi antara berbagai aktor negara dan non-negara. Lemos dan Agrawal (2006) menjelaskan mengenai *environmental governance* sebagai suatu sistem dalam langkah dan pembuatan pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan lingkungan yang melibatkan beragam aktor, mulai dari pemerintah nasional, organisasi internasional, komunitas lokal, masyarakat adat, hingga lembaga ilmiah dan sektor non-negara lainnya. Dalam *environmental governance* modern terdapat tema utama atau prinsip yakni, lintas level, globalisasi, desentralisasi, market atau masyarakat (Lemos & Agrawal, 2006). Hal ini penting untuk merespons persoalan masalah lingkungan yang bersifat transnasional dan saling terhubung, seperti perubahan iklim, pencemaran laut, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem.

Pendekatan ini menghasilkan sorotan dalam pentingnya suatu koordinasi atau kerjasama lintas level (*multi-level governance*). Dimana tata kelola level lokal, nasional, regional, maupun global, serta kolaborasi lintas aktor atau aktor dalam *governance* dalam merespons tantangan lingkungan maupun persoalan mengenai lingkungan hidup yang secara sepihak atau unilateral tidak bisa dilakukan untuk penyelesaian. Aktor-aktor dalam global governance meliputi negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, para ahli, jaringan politik global, dan perusahaan multinasional. Masalah lingkungan bersifat multi skala atau multi tingkatan sehingga memerlukan koordinasi antar level pemerintahan atau negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, para ahli, jaringan politik global, dan perusahaan multinasional. Globalisasi, dimana terdapat percepatan dalam terjadinya perubahan maupun pendistribusian polutan yang menimbulkan tekanan yang baru untuk pemerintah dalam mengatur sumber daya. Dimana globalisasi pun memperkuat keterhubungan antara ekonomi, populasi, dan lingkungan, *governance* harus berfungsi tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga melalui kerja sama regional dan internasional.

Keterlibatan aktor lokal dalam pengelolaan sumber daya, dan

desentralisasi muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan yang berfokus pada negara, dan mendorong partisipasi komunitas serta peningkatan akuntabilitas lokal. Dan market atau masyarakat menjadi bagian dalam tata kelola lingkungan ini juga mengenai adanya instrumen seperti pasar karbon, *tax* maupun sertifikasi untuk merubah perilaku dalam berinteraksi mengenai lingkungan melalui ekonomi. Penekanan keterbatasan atas kerentanan terhadap memanfaatkan fasilitas publik oleh pelaku swasta tanpa adanya kontribusi dan ketergantungan pada preferensi konsumen atau kemampuan finansial aktor tertentu. Disisi lain pentingnya keberadaan *epistemic communities* yang disorot Lemos dan Agrawal yakni komunitas atau jaringan ilmuwan yang memiliki basis sains yang menjadi pendukung dalam keefektivan tata kelola. Lemos & Agrawal (2006) pun mengenai ketimpangan bahwa ketidakmerataan dan manfaat dari dimensi keadilan dan legitimasi ini menciptakan dilema etika dan demokrasi dalam tata kelola lingkungan global. Karena itulah prinsip *inclusive governance* menjadi penting, termasuk keterlibatan *Indigenous Peoples* dalam *Arctic Council* dan AMAP.

Dalam konteks penyusunan ini. *environmental governance* untuk melihat dan memahami bagaimana *Arctic Council* melalui AMAP dalam bekerja mengatasi kerusakan lingkungan dengan berbasis pengetahuan atau ilmiah, koordinasi *multi level*, maupun keterlibatan lintas aktor. Dalam konteks Arktik, *environmental governance* pada wilayah ini merupakan kawasan geopolitik yang kompleks, dihuni oleh berbagai negara dengan kepentingan berbeda, serta komunitas adat yang sangat tergantung pada ekosistem lokal. Organisasi seperti *Arctic Council*, memainkan peran dalam membangun norma, memfasilitasi koordinasi dan kerjasama berkelanjutan yang berbasis sains atau ilmiah.

1.5.2. Organisasi Regional

Konsep organisasi regional mengArctic Councilu pada bentuk kerja sama antarnegara yang berada dalam satu kawasan geografis tertentu. hal ini juga diartikan menjadi sub kelompok organisasi yang terdiri dari lembaga dengan keanggotaan pemerintah dari wilayah geografis tertentu. Dalam pembentukan organisasi regional didasarkan pada kesamaan kepentingan, kedekatan wilayah,

serta kebutuhan untuk mengelola isu lintas batas secara kolektif. Organisasi-organisasi ini biasanya memiliki struktur kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta perangkat normatif yang menjadi dasar interaksi antar anggota. Menurut Joseph S. Nye (1968), organisasi regional merupakan negara dengan jumlah terbatas yang saling dihubungkan oleh geografis serta tingkat hubungan saling ketergantungan. Dengan ini, organisasi terbentuk karena adanya kebutuhan dan kepentingan bersama sehingga mendorong terjalinnya kerjasama. Dan Nye (1968) pun memasukkan organisasi regional sebagai sebuah bentuk *functional institution*, yaitu wadah kerjasama antar negara dalam satu kawasan. Kemudian organisasi regional sebagai bentuk *functional cooperation*, yaitu kerjasama yang tercipta dari kebutuhan teknis dan praktis tertentu. Kerjasama ini cenderung lebih berkelanjutan karena fokusnya pada penyelesaian masalah nyata seperti lingkungan.

Konsep organisasi regional juga tidak dapat dilepaskan dari gagasan *functionalism*, yang menekankan bahwa kerja sama biasanya bermula dari kebutuhan praktis dalam isu-isu teknis sebelum berkembang menuju bidang yang lebih luas. Bentuk fungsional ini digunakan untuk melihat dan memahami mengapa banyak dari organisasi regional yang tidak memiliki kekuatan mengikat atau hukum, namun tetap memiliki peran dalam tata kelola yang ada di kawasan. Nye (1971) bahwa kerja sama regional sering dimulai dari sektor-sektor yang tidak terlalu politis, seperti transportasi, lingkungan, atau kesehatan, lalu berkembang karena adanya kebutuhan untuk memperluas koordinasi. Dalam konteks lingkungan hidup dan perubahan iklim, organisasi regional dipandang sebagai aktor dalam mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Organisasi regional tidak hanya berperan dalam kerja sama ekonomi, tetapi juga dapat menjadi katalisator dalam agenda global seperti keberlanjutan dan pengelolaan ekosistem. Di kawasan Arktik, *Arctic Council* merupakan contoh organisasi regional yang memainkan peran dalam koordinasi lintas negara terkait isu lingkungan, terutama dalam konteks perubahan iklim dan dampak aktivitas manusia. Dengan demikian, konsep organisasi regional dalam penelitian ini digunakan untuk memahami *Arctic Council* sebagai aktor kolektif yang memiliki kapasitas kelembagaan dalam mengelola isu lingkungan kawasan Arktik. *Arctic Council*

tidak diposisikan sebagai pembuat kebijakan yang bersifat mengikat, tetapi sebagai wadah kerja sama regional yang memfasilitasi koordinasi, pertukaran pengetahuan, dan pembentukan norma bersama. Dalam kerangka ini, peran AMAP sebagai *working group* teknis dapat dipahami sebagai manifestasi dari kerja sama fungsional yang menjadi inti organisasi regional menurut Nye.

1.5.3. Green Politics

Green Politics atau disebut juga politik hijau merupakan pendekatan politik yang menempatkan isu lingkungan atau krisis lingkungan sebagai bagian dari keputusan kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kestabilan ekonomi. Dimana hal ini sebagai batas dalam menjaga alam untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta pemerintahan. Peter Newell melalui *Global Green Politics* (2020) pun memaparkan bahwa isu yang menyangkut lingkungan merupakan isu politik sehingga harus dikaji dengan hubungan kekuasaan, keadilan, partisipasi, dan nilai ekologis. *Green Politics* menolak asumsi bahwa pasar dan negara secara otomatis mampu mengelola lingkungan secara efektif, karena keduanya sering kali terjebak dalam kepentingan jangka pendek dan tekanan politik-ekonomi tertentu (Newell, 2020). Sehingga *Green politics* menekankan pada perlindungan ekologis dan juga keberlanjutan ekologis, serta menekankan pengetahuan ilmiah dan juga aktor, serta tata kelola berperan dalam mengatasi isu lingkungan. Peter Newell (2020) menekankan bahwa politik lingkungan modern ditandai dengan adanya ketrikatan hubungan antara pengetahuan ilmiah dan pembuatan kebijakan, dimana politik lingkungan terbentuk dengan adanya aktor-aktor yang beragam seperti negara, institusi, ilmuwan, masyarakat adat, maupun LSM. Dengan demikian, ilmuwan maupun jaringan profesional serta lembaga yang menghasilkan pengetahuan ilmiah memiliki pengaruh dalam mempengaruhi kebijakan memiliki peran penting apa yang disebut *epistemic community* (Newell, 2020).

Salah satu gagasan kunci dalam *Green Politics* menurut Newell adalah konsep *power and responsibility*. Newell menegaskan bahwa kerusakan

lingkungan terkait erat dengan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global, seperti negara maju, korporasi multinasional, dan institusi internasional tertentu. *Green Politics* juga menekankan pentingnya demokratisasi pengambilan keputusan lingkungan. Menurut Newell, kebijakan lingkungan yang dirumuskan secara eksklusif oleh aktor politik dan pakar akan berisiko mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, komunitas adat, dan kelompok marjinal. Oleh karena itu, *Green Politics* mendorong partisipasi publik yang lebih luas, transparansi informasi, serta keterlibatan aktor non-negara dalam proses tata kelola lingkungan. *Politics of responsibility* menjadi elemen penting dalam Green Politics. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab moral dan politik terhadap keberlanjutan sistem kehidupan di masa depan. Dalam pandangan Green Politics, kebijakan lingkungan seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan efisiensi ekonomi atau kepentingan nasional saja, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan generasi mendatang.

Green Politics dalam tata kelola lingkungan global yang didominasi oleh mekanisme sukarela dan *non-binding*, Newell menyoroti bahwa meskipun pendekatan *soft governance* sering dianggap fleksibel dalam praktiknya mekanisme tersebut kerap kurang efisien menghasilkan perubahan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang kuat. Dengan ini *Green Politics* menyediakan kerangka analitis untuk memahami lingkungan sebagai arena politik yang sarat dengan konflik kepentingan, relasi kekuasaan, dan pertarungan nilai. Dalam penelitian ini, *Green Politics* digunakan sebagai lensa untuk menilai sejauh mana mekanisme tata kelola berbasis sains mampu beroperasi secara adil, inklusif, dan bertanggung jawab di tengah dinamika politik internasional.

1.6. Asumsi Penelitian

Penelitian ini memiliki asumsi bahwa *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) sebagai *working group* dari *Arctic Council*, diasumsikan sebagai berikut:

1. *Arctic Council* memiliki peran dalam mengawasi dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kerusakan lingkungan di Arktik.
2. *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP) sebagai *working group Arctic Council* memberikan kontribusi dalam pengawasan dan penilaian tingkat kerusakan di Arktik.

1.7. Kerangka Analisis

